

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT BERBASIS MASYARAKAT
DI KAWASAN TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE
KABUPATEN SELAYAR**

*Community-Based Management of the Marine Resources
Of Taka Bonerate National Park in Selayar Agency*



A Z W A R
P0202204008

**PEMBANGUNAN MASYARAKAT
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT BERBASIS MASYARAKAT
DI KAWASAN TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE
KABUPATEN SELAYAR**

*Community-Based Management of the Marine Resources
Of Taka Bonerate National Park in Selayar Agency*

**Tesis
Sebagai Salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi
PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

Disusun dan Diajukan oleh

A Z W A R

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

PRAKATA

Segala puji bagi Allah swt, yang telah menciptakan manusia dengan akal sehingga menjadi makhluk yang sempurna. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap ada pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai akhir zaman.

Studi ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Sehingga dapat memberikan masukan kepada publik untuk memikirkan solusi kedepan.

Penyelesaian tugas akhir (tesis) ini tak lepas dari peran aktif berbagai pihak yang memberikan bantuan materi, moril dan bimbingan. Kepada beliau-beliau yang telah memberikan pikiran, ilmu dan meluangkan waktu maka penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta MASYKUR. R yang telah memberikan motivasi dalam studiku. Ibunda terkasih KASMAWATI yang menjadi semangat hidupku dan menerangiku dengan doa, kakakku yang Nurnaningsih, Sukmawan yang selalu menjadi panutan, serta adikku Cahyani dan Masnawati.
2. Dr. Ir. Yusran Nur Indar, M.Phil selaku pembimbing pertama yang rela meluangkan waktu dan atas kesabaran untuk membimbing dalam penyusunan tesis ini serta keilmuan yang diajarkan kepada penulis.
3. Drs. Mansur Radjab, M.Si selaku pembimbing kedua atas segala pengertian, kebijaksanaan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.

4. Ketua Program Studi Konsentrasi Pembangunan Masyarakat dan para dosen atas bimbingan dan wawasan Pembangunan Masyarakat yang telah diberikan dan suasana keilmuan yang tercipta.
5. Pihak Beasiswa Program Pascasarjana yang memberikan bantuan dana dalam pelaksanaan studi penulis.
6. Masyarakat Pulau Rajuni yang telah menerima saya dan segala informasinya.
7. Rekan-rekan se-angkatan 2004 Kak Pai, Kak Mahbub, Kak Ichsan, Kak Tiar, Kak Ay dan Kak Lukman yang telah berbagi ilmu dan rasa, kebersamaan kita menambah warna dalam hidupku.
8. My heni Ningsih yang penuh kesabaran dan kesetiaan menemani penulis dalam menjalani studi dan membantu penyusunan tesis ini.
9. Saudara-saudariku di pondokan Rawa Permai yang banyak memberiku gambaran dan motivasi kedewasaan sikapnya, kerabatku di jurusan Antropologi, khususnya angkatan 97.
10. Pihak yang namanya tidak tercantum satu persatu namun telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.

Akhir kata, penulis hanya dapat mendoakan dan mengucapkan *jazakumullahu khaeran* (semoga Allah membalas segala jasa dengan kebaikan) dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca. Amin

Makassar, April 2007

A Z W A R

ABSTRACT

AZWAR, Community-Based Management of the Marine Resources Of Taka Bonerate National Park in Selayar Agency (supervised by **Yusran Nur Indar** dan **Mansur Radjab**).

The study aims to investigate the problems in the marine resources management of the National Park of *Taka Bonerate* and the management types performance by both the local and the visiting fishermen.

The study is conducted in the National Park area of *Taka Bonerate* particularly in Rajuni Island. The island is located in the middle of the national park. The methods used to collect data needed for the study are interviews, observations, and documents examinations. The data are analyzed and qualitatively.

He result indicates that the marine resources management is crucial and needs more serious attention from various stakeholders : government, NGOs, and local community-based management of the marine resource will have social and economic impacts on the people and some consequences on the environment.

ABSTRAK

AZWAR, *Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Selayar* (dibimbing oleh Yusran Nur Indar dan Mansur Radjab).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan permasalahan pengelolaan sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dan bentuk pengelolaan sumber daya laut oleh nelayan lokal dan pendatang.

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate (Khususnya Pulau Rajuni). Pulau Rajuni merupakan pulau yang terletak ditengah-tengah Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan telaah dokumen serta pengolahan data dan dianalisa secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya laut perlu perhatian lebih serius dari berbagai kalangan. Seperti Pemerintah, NGO, dan Lembaga Masyarakat lokal. Bentuk pengelolaan sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dilakukan oleh nelayan lokal dan nelayan pendatang. Dampak pengelolaan sumber daya laut ini berakibat pada lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat.

DAFTAR RALAT

No	Halaman	Ralat	Harusnya
1.	iii	Marine Resource Management Based Community in Taka Bonerate National Park Area Kabupaten Selayar	Community-Based Management of the Marine Resources Of Taka Bonerate National Park in Selayar Agency

DAFTAR TABEL

1.	Table 1 : Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin.....	53
2.	Tabel 2 : Jenis Pekerjaan Di KTNB.....	54
3.	Tabel 3 : Tingkat Pendidikan Penduduk di KTNB.....	56
4.	Tabel 4 : Nama-Nama Pulau dan Makananya.....	62

DAFTAR STRUKTUR

1. Struktur Kerangka Pikir..... 42
2. Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Taka Bonerate 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perikanan dan kelautan merupakan potensi sumber daya di Indonesia. Potensi ini diantaranya potensi hayati dan non hayati. Potensi hayati misalnya perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Potensi non hayati misalnya mineral, bahan tambang dan pariwisata. Semua itu merupakan potensi yang perlu dikembangkan demi kelangsungan ekosistem dan kemakmuran penduduk yang mengelolanya.

Sumber daya yang ada perlu dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga mampu mengangkat masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan. Sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang tidak seimbang menjadi masalah utama. Sumber daya manusia yang ada di sekitar sumber daya alam, memerlukan pembinaan dan pendidikan yang berkelanjutan. Pada dasarnya mereka mempunyai pengetahuan secara lokal (budaya) yaitu, Budaya mereka mengenai pengelolaan sumber daya laut secara tradisional yang berbeda-beda pada setiap komunitas.

Maka keikutsertaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting. Sebab, walaupun masyarakat kurang dari segi perencanaan program namun mereka dapat memahami bagaimana mengelola sumber daya alam secara sosial budaya yang ramah lingkungan, juga memiliki akar budaya yang kuat tergabung dalam sebuah kepercayaan

(*religion*). Sistem pengelolaan masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sumber daya alamnya. Masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, bentuk, dan tujuan aspirasinya serta mereka sendiri yang membuat keputusan demi kesejahteraan melalui sebuah pembangunan masyarakat.

Melihat realitas sumber daya alam laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate maka dibutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan dan menjadi terminologi kegiatan masyarakat dalam mengelola ruang, sumber daya, atau mengelola sumber daya yang terdapat dalam wilayah laut. Pengelolaan di fokuskan pada pemanfaatan sumber daya laut dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dengan melakukan penilaian secara menyeluruh. Dalam rangkai pengelolaan diperlukan perencanaan untuk berkoordinasi dan mengarahkan berbagai aktivitas dari berbagai sektor pembangunan. Perencanaan yang dimaksud sebagai suatu upayah secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmonisasikan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate merupakan sumber daya alam yang memiliki terumbu karang terluas di Indonesia dan terluas ketiga di dunia yang berada di Laut Flores Kabupaten Selayar. Persoalan yang dihadapi oleh komunitas Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate adalah

pengelolaan yang berbentuk eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan. Kondisi penduduk yang semakin bertambah dan bertambah miskin, dan minimnya pengetahuan modern untuk pengelolaan sumber daya yang ekonomis dan ramah lingkungan.

Potensi sumber daya laut seperti terumbu karang (*coral reef*) merupakan kekayaan laut tropis yang mengandung banyak potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat. Ekosistem terumbu karang dikenal sebagai daerah yang subur karena memiliki biota laut yang melimpah dengan produktivitas yang tinggi. Komponen biota terpenting terumbu karang ialah hewan karang batu. Disamping itu sangat banyak jenis biota lainnya yang hidup mempunyai kaitan erat dengan karang batu. Kesemuanya terjadi dalam hubungan fungsional yang harmonis dalam suatu ekosistem yang dikenal sebagai terumbu karang.

Sumber daya hayati terumbu karang dapat pula menghasilkan berbagai produk yang bernilai ekonomis seperti karang, udang, karang alga, teripang, karang mutiara, dan sebagainya dengan memfokuskan terumbu karang dalam beberapa manfaatnya. Potensi sumber daya alam (laut) di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate berupa terumbu karang. Antara lain terumbu karang panata (*fringing reef*) yang terdapat sepanjang pantai dan mencapai kedalaman 40 meter. Terumbu karang penghalang (*barrier reef*) berada jauh dari pantai (biasa puluhan atau ratusan kilometer) dipisahkan oleh goba yan

berada pada kedalaman 40-75 meter. Atol merupakan terumbu karang yang bentuknya melingkar mirip cincing mengitari globa yang dalamnya 40 -100 meter. Terumbu karang mempunyai fungsi disamping rumah ikan juga sebagai obat untuk penyakit kanker apabila sudah dicampur bahan kimia. Terumbu karang juga memiliki arti penting bagi ekosistem perairan. Kerusakan terumbu karang tidak hanya mengakibatkan turunnya produktivitas tetapi juga mengurangi populasi organisme air serta dapat terjadi abrasi pantai.

Berlandaskan pada perspektif ekologi yang kritis sementara dapat disimpulkan bahwa telah terjadi antara lain : (1). Kemerosotan stok sumber daya alam yang diakibatkan oleh penangkapan berlebihan, ini sekaligus menunjukkan gejala ketidakseimbangan antara kondisi sumberdaya dengan tingkat populasi penduduk yang memanfaatkannya. (2). Gejala kerusakan lingkungan ekosistem laut, khususnya ekosistem mangrove dan terumbu karang. (3). Lokasi-lokasi dimana berlangsung aktivitas eksploitasi sumber daya seperti fenomena ekosistem tertutup malaikan lingkungan terbuka bagi pengguna sumber daya dari berbagai tempat asal, etnis, dan kategori sosial, dan (4). Ketimpangan sosial ekonomi berkenaan dengan alokasi pemanfaatan sumber daya diantara individu atau kelompok nelayan.

Fakta membuktikan bahwa kurang atau tidak berfungsinya lagi suatu ekosistem, nilai-nilai dasar atau suatu institusi pada tingkat populasi desa, komuniti pulau-pulau dan pesisir, kelompok sosial berbeda-beda, yang

diasumsikan sebagai mekanisme regulasi pemanfaatan sumber daya alam secara merata, berkelanjutan dan lestari. Menjadi relevan mempertanyakan, bahwa nilai-nilai berorientasi konservasi yang menyebar luas dan dipertahankan oleh kelompok etnis atau kelompok sosia ekonomi tertentu sebetulnya lebih banyak merupakan ideal atau mite/dogma semata daripada nyata dalam praktek. Jika pada kelompok etnik atau sub-etnik tertentu pada suatu waktu tertentu pandangan dan praktek konservasi (dalam artian pemanfaatan secara berkelanjutan/lestari) tinggal terwujud sebagai sisa-sisa kearifan lingkungan atau pengetahuan indigen yang sedang terkikis, lalu faktor apa secara signifikan menyebabkan demikian ?. Apakah pernah atau masih ada suatu sistem tradisional yang bias menceritakan kepada kita adanya praktek pemanfaatan sumber daya berkelanjutan dan lestari.

Pemerintah melakukan tindakan nyata dalam menyelamatkan keadaan tersebut. Dengan membuat Rencana Pengelolaan Taman Laut Nasional Taka Bonerate disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Nasional yang ditetapkan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No : 59/Kpts/Dj-VI/1993. Paradigma Penyusunan Strategi Pengelolaan Taman Laut Nasional Taka Bonerate berdasarkan pada fenomena-fenomena faktual yang digali melalui berbagai penelitian dan survey lapangan.

Selain itu, meskipun belum cukup banyak data akurat, namun terdapat petunjuk bahwa kebijaksanaan sub-sektor perikanan dan kelautan telah

mengancam kelestarian sumber daya alam perikanan dan lingkungan ekosistem laut. Kebijakan tersebut sekurang-kurangnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 1996 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karenanya, pengelolaan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate perlu perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat, pemerhati lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat. Tanpa melakukan pengelolaan yang tepat akan mengakibatkan resiko yang cukup parah. Untuk mengatasi hal tersebut peran serta dari masyarakat lokal sangat besar, merekalah yang mengetahui dan memanfaatkan sumber daya alamnya dan merasakan manfaatnya secara langsung.

Berbagai upaya dalam merevitalisasi kembali ekosistem yang rusak akibat eksploitasi yang berlebihan berbagai upaya dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Termasuk melalui program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (COREMAP) fase I (Inisiasi) pada tahun 1998-2002. komponen utama pada fase I meliputi pengelolaan program (*management, policy, strategy and legal framework*), kesadaran masyarakat (*Community Based Management*), pemantauan dan survey (*Reserch and Information*), peningkatan kapasitas dan pelatihan (*Capacity Building and Training*).

Kemudian COREMAP pada Fase II lebih kepada pembangunan masyarakat (*Community Development*). Pembangunan Masyarakat yang dipandang sebagai paradigma baru dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Paradigma muncul karena kekurangpuasan dalam pendekatan sebelumnya, yang cenderung *individualistic* dan otoriter yang berbias pada ekonomi pasar. Penggunaan pendekatan berbasis komunitas menggunakan ikatan-ikatan horizontal sebagai pilar utama dan menggunakan kaca mata yang lebih luas (dari sekedar pembangunan ekonomi) dapat dipandang sebagai langkah inovatif dalam pembangunan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Ikatan horizontal dalam suatu komunitas Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate merupakan bagian *sosial capital* yang sangat penting untuk mengembangkan berbagai tindakan kolektif. Salah satu syarat munculnya tindakan kolektif tersebut adalah terbangunnya sesuatu partisipasi, perencanaan sampai evaluasi.

Pembangunan masyarakat seperti diatas selalu diarahkan pada pendekatan partisipatori dengan unsur dan model pembangunan masyarakat menurut Daramawan Salman (2005), Nico.S Kalangi (1994) Syahyuti (2005), Budianto (2006) dan Deddy T. Tikson (2001). Model pembangunan yang berdasarkan kondisi masyarakat sebagai obyek pembangunan. Meskipun dianggap bahwa masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk merumuskan dan membuat perencanaan. Namun, disinilah porsi para ahli melihat kelebihan dari masyarakat untuk merumuskan kebijakan dan perencanaan.

Masyarakat lokal mampu membuat pendefinisian dan memutuskan suatu bentuk program.

Sehingga perlu pengkajian lebih lanjut mengenai sosial ekonomi dan lingkungan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Berbagai aktifitas yang selama ini dihadapkan berbagai masalah dalam masyarakat. Ada beberapa rujukan atau acuan. Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alder dan Christanty (2005) lebih berfokus pada strategi pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat. Pengelolaan berbasis masyarakat bukanlah solusi atas masalah pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, bukan pula suatu program penegakan hukum dengan sendirinya. Penegakan hukum dalam waktu jangka panjang dengan diiringi dengan sistem pendidikan masyarakat. Jadi, perubahan sosial bagi masyarakat nelayan tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, namun memerlukan proses pendidikan dan penyadaran hingga satu generasi dan disatukan dengan program lain untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi penduduk.

Penelitian serupa dilakukan oleh Budianty (2006), masalah studi kasus terkait dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang oleh suatu komunitas nelayan di Pulau Tambolongan, Selayar, Sulawesi Selatan. Komunitas nelayan pulau ini memiliki suatu kawasan terumbu karang di sekitar pulau yang berusaha mereka jaga dengan baik, karena kaya akan sumber daya ikan. Komunitas membuat aturan bahwa penangkapan ikan di kawasan terumbu karang ini hanya bisa dilakukan dengan memancing, dan dilarang

menggunakan bom ikan atau bius ikan. Karena mereka menganggap jika kawasan itu hancur oleh bom dan bius ikan maka tidak ada lagi tempat bagi nelayan Tambolongan mencari ikan di sekitar pulau. Kesepakatan aturan dan sanksi telah ditetapkan oleh komunitas di Dusun Lemba yang terdiri dari sekitar 57 KK (Harian Fajar, 23 Desember 2005). Kegiatan penangkapan ikan dengan bom dan bius ikan berarti melanggar aturan yang telah disepakati, dan harus dicegah.

Tantangan aturan lokal semacam ini biasanya datang dari nelayan yang berasal dari luar komunitas, dan dari ada atau tidaknya pengakuan pemerintah di tingkat regional atau nasional terhadap pengaturan kelembagaan semacam ini. Patut disayangkan jika komunitas yang sudah sedemikian rupa memiliki kesadaran untuk memelihara ekosistem terumbu karang dan membuat aturan dalam pemanfaatannya, terkendala karena pandangan bahwa penetapan aturan dan sanksi merupakan kewenangan pemerintah semata. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah lebih berfokus kepada implementasi dari komuniti secara institusi yang disepakati bersama.

Implementasi terhadap program yang akan dilakukan dalam memanfaatkan sumber daya laut. Kalau sebelumnya melihat bagaimana ancaman dari luar akan pengelolaan sumber daya maka penelitian ini melihat bagaimana penataan sumber daya laut yang akan dikelola. Jadi sangat jelas bahwa tidak mempermasalahkan siapa yang akan memanfaatkan nanti,

namun mereka harus melalui jalur institusi yang dibangun. Institusi yang dibangun harus mematuhi aturan, norma, dan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Kemudian Zulfinas Indra (2006) menekankan pada kelembagaan masyarakat dalam mengelola kawasan pesisir di Taman Nasional Taka Bonerate. Metode yang digunakan dengan melakukan analisis SWOT dalam melihat eksistensi masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir di Taman Nasional Taka Bonerate. Dalam thesis melihat lembaga sosial seperti upacara perkawinan dan *Punggawa-Sawi* dan organisasi lain yang dibentuk secara modern seperti Kelompok Masyarakat (POKMAS) Konservasi, Produksi, Perempuan, Lembaga Kredit Masyarakat (LKM), Lembaga Keuangan Desa (LKD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Hasil penelitiannya lebih fokus pada pengkajian struktur, aturan, norma yang ada dalam sebuah institusi dan organisasi. Serta keterlibatan masyarakat melalui institusi dan organisasi beserta peran pemerintah.

Yang membedakan dengan penelitian ini adalah lebih berfokus pada pengelolaan sumber daya laut yang berbasis masyarakat. Pengelolaan di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate yang dilakukan oleh sampai pada bagaimana pihak pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah turun tangan. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan yang ada perlu dikaji seperti nelayan sebagai pelaku utama. Sebab, masyarakat Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate memiliki pekerjaan pokok sebagai nelayan.

Kemudian selain nelayan lokal ada pula nelayan pendatang yang sangat mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan. Selain itu, peran pemerintah sebagai pihak ketiga yang ikut dalam memecahkan masalah.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini memberi pengertian peran serta masyarakat dengan istilah *community based*. *Community based* adalah sebagai peran aktif masyarakat mengembangkan kemandirian dalam pembangunan menuju kehidupan yang sejahtera dan ramah lingkungan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Thesis ini dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keikutsertaan dalam pengelolaan sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate ?
2. Bagaiman bentuk-bntuk pengelolaan sumber daya laut oleh nelayan lokal dan nelayan pendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan, menjelaskan dan menganalisis dari bentuk dari *community based management* terhadap pengelolaan sumber daya laut di Kawasan Taka Bonerate. Tujuan penelitian ingin menjelaskan permasalahan, antara lain :

1. Bagaiman keikutsertaan dalam pengelolaan sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.
2. Bagaiman bentuk-bntuk pengelolaan sumber daya laut oleh nelayan lokal dan nelayan pendatang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak terkait dan dapat dijadikan bahan pengkajian selanjutnya. Manfaat lain dari hasil penelitian dapat dijadikan masukan pada pihak pemerintah Kabupaten Selayar dalam merumuskan kembali kebijakan yang perlu diperbaiki mengenai pengelolaan sumber daya laut. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study pada program Pembangunan Masyarakat pada Pascasarjana Unhas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber Daya Laut Kawasan Taka Bonerate

1. Terumbu Karang

Karang tergolong dalam jenis makhluk hidup (hewan) yaitu sebagai individu organisme atau komponen dari hewan. Terumbu karang (*coral reefs*) sebagai suatu ekosistem termasuk dalam organisme-organisme karang. Terumbu Karang (*coral reefs*) merupakan organisme yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur (CaCO_3) yang cukup kuat menahan gaya gelombang laut. Selanjutnya menyatakan terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu (karang hermatipik) dari filum Coridaria, ordo Scleractinia yang hidup bersimbiosis dengan zooxantellae dan sedikit tambahan alga berkapur serta organisme lain yang menyeleksi kalsium karbonat. Karang hermatipik (*Hermatypic corals*) yang bersimbiosis dengan alga melaksanakan fotosintesis, sehingga peranan cahaya sinar matahari penting sekali bagi *Hermatypic corals*. *Hermatypic corals* biasanya hidup di perairan pantai/laut yang cukup dangkal di mana penetrasi cahaya matahari masih sampai ke dasar perairan, selain itu untuk hidup lebih baik binatang karang membutuhkan suhu air yang hangat berkisar antara 25-32 °C . (Dawes 1981 dan Bengen D.G. 2001., dalam Budiharsono S. 2001 : 1-2).

Taka Bonerate merupakan kawasan terumbu karang terluas di Indonesia dan terluas ketiga didunia. Terletak dilaut flores di Sulawesi Selatan. Indonesia memiliki kurang lebih 50.000 km² ekosistem terumbu karang yang terbesar diseluruh wilayah pesisir dan lautan (Dahuri, 2001). Terumbu karang mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, pelindung fisik, tempat pemijatan, tempat bermain dan asuhan berbagai biota. Terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai ekonomi penting seperti berbagai jenis hasil perikanan, batu karang untuk konstruksi. Taka Bonerate merupakan contoh persoalan yang dihadapi pengelolaan laut diseluruh dunia; eksploitasi sumber daya berlebihan, kondisi sosial ekonomi dimana semakin banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, minimnya pengelolaan sumber daya laut, pihak ketiga yang saling konflik dan bersaing, silang sengketa yuridiksi dan lemahnya penegakan hukum (Dahuri 2001, Jackei dan Linda 2005 ; 369).

Dari segi estetika, terumbu karang dapat menampilkan pemandangan yang sangat indah. Upaya pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dengan melibatkan masyarakat sangat dibutuhkan. Pada kasus di Bali (Dahuri, 2001) dimana masyarakat melakukan pengembalian karang secara intensif harus dicegah dengan mencari alternative berupa pengelolaan wilayah tersebut untuk kepentingan turis dan melibatkan masyarakat didalamnya.

Cara seperti ini telah berhasil dilakukan di Bunakeng Sulawesi Utara dimana masyarakat dilibatkan dalam sektor ekonomi seperti pelayanan pada penjualan souvenir, makanan kecil, dan penyediaan fasilitas pelayanan untuk menikmati terumbu karang, perahu katamar (perahu yang mempunyai kaca pada bagian tengah) atau jasa scuba diving. Sedangkan perusahaan bisa menyediakan fasilitas hotel, restoran dan lain-lain (Latama, 2002 ; 5-6). Ini adalah contoh dan model yang paling tepat untuk dikembangkan sebagai suatu model ekoturisme yang melibatkan komunitas lokal.

Namun kegiatan manusia seperti penambangan karang dengan atau tanpa bahan peledak, pengerukan di sekitar terumbu karang, penangkapan ikan dengan bahan peledak, lalu lintas pelayaran, pertambangan dan lainnya telah menimbulkan masalah besar bagi kerusakan terumbu karang. (Dahuri R.*et al.* 2001).

Akar permasalahan kerusakan terumbu karang meliputi empat hal yaitu (1) Kemiskinan masyarakat dan ketiadaan mata pencaharian alternatif (2) ketidaktahuan dan ketidaksadaran masyarakat dan pengguna (3) lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) dan (4) kebijakan pemerintah yang belum menunjukkan perhatian yang optimal dalam mengelola sistem alami dan kualitas lingkungan kawasan pesisir dan lautan khususnya terumbu karang. (Budiharsono S., 2001 : 1-4).

Permasalahan di atas pengelolaan terumbu karang tersebut maka target penanganannya adalah (1) target sosial, dimana meningkatnya status

kesejahteraan masyarakat dan pengguna, tingkat partisipasi masyarakat dan pengguna dalam kegiatan dan pemanfaatan terumbu karang semakin meningkat, (2) target konservasi ekologi yaitu implementasi dan penegakan peraturan semakin membaik dan gejala *over-exploitation* terumbu karang semakin berkurang, menurunnya sedimentasi yang berasal dari aktivitas di daratan, (3) target ekonomi, yaitu pendapatan masyarakat dan *stakeholders* meningkat, tingkat pengangguran semakin menurun, dan terwujudnya sistem pembagian hasil kegiatan usaha yang semakin adil (4) target kelembagaan, yaitu konflik pemanfaatan ruang antar masyarakat dan *stakeholders* semakin berkurang dan terbentuknya aturan yang dapat difahami, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat dan *stakeholders*. (Budiharsono S., 2001 : 1-3)

2. Potensi Sumber Daya Laut

Menurut hasil penelitian Latama, (2002 ; 6-7) bahwa, Potensi sumberdaya perikanan laut di Indonesia terdiri dari sumber daya perikanan pelagis besar (451.830 ton/tahun) dan pelagis kecil (2.423.000 ton/tahun), sumber perikanan demersal (3.163.630 ton/tahun), udang (100.720 ton/tehun), ikan karang (80.082 ton/pertahun) dan cumi-cumi (328.960 ton/tahun). Data pada tahun 1998 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan potensi laut baru mencapai 57,0 % dan lahan pertambakan diperkirakan seluas 866.550 Ha dan baru dimanfaatkan seluas 344.759 Ha (39.78 %) bahkan lebih tinggi lagi (Dirjen Perikanan ; 1999 dalam Latama ; 2002). Dengan demikian masih sangat besar peluang untuk memanfaatkan sumber

daya laut dalam peningkatan produksi dan produktivitas lahan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan produksi yang diatur sehingga bisa mendatangkan keuntungan bagi semua pihak dan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Kondisi habitat terumbu karang di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate masih relatif baik jika dibandingkan di wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan. Namun sebagian diantaranya telah mengalami kerusakan utamanya terumbu karang yang terletak cukup jauh dari pantai. Atol terdiri dari gugusan pulau-pulau yang jumlahnya cukup banyak.

Ekosistem padang lamus tropis keberadaannya bersifat ekstensif disemua bagian Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, utamanya pada daerah-daerah berpasir berlumpur. Padang lamun tersebut berfungsi sebagai habitat mencari makan bagi beberapa jenis penyu seperti penyu hijau dan penyu sisik, duyung, dan ikan-ikan herbivore. Kedua jenis ekosistem terdapat di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate merupakan ekosistem yang berperan penting tingginya produktivitas.

Ikan merupakan organisme yang banyak terdapat pada ekosistem karang, dan merupakan penyokong hubungan yang ada dalam ekosistem. Ikan yang ditemukan di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate terdiri dari ikan karang dan ikan pelagis. Kedua jenis ikan tersebut mempunyai keanekaragaman cukup tinggi. Tingginya keanekaragaman berbagai jenis ikan disebabkan terumbu karang mempunyai berbagai variasi habitat, mulai

dari daerah berpasir, berbagai lekuk dan celah, daerah algae dan juga daerah-daerah dangkal dan dalam serta zona-zona yang berbeda melintang karang. (Indra 2006 : 48-49).

Survey yang dilakukan LIPI tentang keragaman ikan pada tiga belas karang ditemukan 325 genus dari 34 famili. Jenis-jenis ikan yang ditemukan oleh famili *Chaetodontidae*, *Pomacentridae*, *Labridae*, *Scaridae*, *Pomachantidae*, *Apogonidae*, *Gobiidae*, *Lucanidae*, *Caesioidae*, dan *Mullidae*. Sedangkan jenis ikan pelagis yang biasa ditemukan antara lain ikan Hiu (*Sphyna spp*), Cakalang (*Katsuwonius Pelamis*), Tenggiri (*Seomberomorus sp*), Tuna (*Thumus Albacores*). Flora dari wilayah ini belum dikaji seintensif mungkin, namun dalam studi tentang dataran karang ditemukan banyak padang rumput laut di sepanjang atol. Keberagaan karang relative tinggi degan lebih 200 spesies karang yang mewakili 52 genus yang tercatat (LIPI 1995). Kekayaan sumber daya laut di Kawasan Taka Bonerate sangat besar nilainya tidak sebanding dengan pemanfaatan yang dilakukan masyarakat lokal. Namun, faktor sumber daya manusia yang tidak mampu memanfaatkan secara efisien, maka cari jalan yang mudah untuk mendapatkan hasil. Walaupun cara tersebut merusak alam dan ekosistem. Perlu adanya pemberian pemahaman dan mengetahui yang begitu efisien dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan tetap ramah lingkungan.

Selain ikan juga ditemukan jenis hewan reptilia dan mamalia. Hewan reptilian yang dilindungi sering ditemukan yaitu Penyu atara lain Penyu Hijau

(*Chelonia Midos*), Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbricata*), Penyu Tempayan (*Carena-Careni*), Penyu Belimbing (*Dermochelys Coriacea*), Penyu Lekang (*Lepidochelys Olivaeat*) dan Penyu Pipih (*Chelonia Depressus*), sedangkan hewan mamalia yang sering ditemukan seperti Ikan Paus (*Cetacea sp*), Lumba-Lumba (*Tursiops Truncates*) dan Ikan Duyung (*Dugong-Dugong*), (WWF dan LP3M, 1994).

Sehingga usaha penangkapan ikan perlu ada keterampilan bagi masyarakat dengan menggunakan teknologi baru yang efektif dan efisien. Hal ini untuk mengantisipasi persaingan penangkapan oleh negara lain dan nelayan pendatang yang sering masuk perairan Indonesia pada umumnya dan di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate pada khususnya dengan teknologi lebih moderen. Penyadaran perlu diberikan kepada masyarakat adalah bahaya penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak atau penggunaan zat kimia.

Aktivitas ekonomi komunitas di Kawasan Taka Bonerate melibatkan semua keluarga dalam penangkapan ikan baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual. Kebanyakan penghasilan diperoleh dari melaut untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut Jackie dan Linda (2005 ; 374) bahwa tingkat pendapatan sebagian besar rumah tangga relative renda, berkisar dari Rp. 50.000,- hingga Rp. 250.000,- perbulan pada tahun 1991. Sedangkan pendapatan perkapita pertahu sekitar Rp. 460.000,- termasuk tingkat terendah secara nasional, rata-rata pendapatan perkapita di Indonesia adalah Rp. 705.000,-

(Sawyer, 1992). Jika dibandingkan dengan kemiskinan penduduk Kawasan Taka Bonerate, potensi perikanan justru menunjukkan potensi ekonomi wilayah ini. Perubahan sistem sosial ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut, tidak banyak membawa manfaat bagi Komunitas Kawasan Taka Bonerate.

B. Persepsi *Community Development*

Dari sudut Sosiologi, kata *Community* berasal dari bahasa Latin “*munus*” yang bermakna *the gift* (memberi), *cum* dan *together* (kebersamaan) antara satu sama lain. Dapat diartikan komunitas adalah sekelompok orang saling berbagi dan saling mendukung satu sama lain. Syarat pokok agar mereka berbagi dan saling mendukung adalah adanya interaksi sosial sehari-hari yang intensif.

Lahirnya *Community Development* berkaitan dengan komprehensif sebelumnya yang telah dikembangkan sejak paruh abad ke-19 di Inggris dan Denmark. Hal serupa berkembang pula di Amerika Serikat, terutama konsep “*Land Grant*” *Agricultural College* yang didirikan berdasarkan *Morril Act* pada tahun 1862 dan sesudah itu pendirian balai percobaan pertanian sebagai metode perkembangan pertanian dan pendidikan, terutama pendidikan masyarakat, kesejahteraan sosial, serta metode-metode dan konsep-konsep ekstensi pertanian yang telah melandasi perkembangan *Community Development* di Amerika Serikat (Brokensha dan Hodge (1969) dalam Kalangie (1994 :60). Gerakan *community development* di Amerika Serikat

lebih nyata sejak tahun 1916, saat nama *Agricultural Extension Service* didirikan untuk memberikan latihan teknik-teknik bercocok tanah yang lebih produktif dan pekerjaan keterampilan rumah tangga kepada para petani. Badan ini memiliki peranan tersendiri karena sesaat kemudian gagasan badan ini dijadikan model dari banyak sekali program *community development* (Foster 1976 dalam Kalangie 1994 ; 60-61)

Sosiologi pembangunan, Fortes dalam Kalangie 1994 ; 60-61, memberi penjelasan bahwa mengenai pembangunan masyarakat merupakan proses adaptasi dari sistem sosial dan lingkungan yang harus dipersatukan. Sedangkan Antropologi memandang pembangunan adalah proses yang muncul dari sosial budaya. Perubahan sosial berasal dari budaya yang menekankan pada perubahan teknologi produksi, distribusi barang dan jasa.

Pada semua komunitas ditemukan dua hal utama yakni kesamaan dan identitas (*similarly or identity*). Komunitas terbentuk karena memiliki kepentingan bersama. Subtansi dari elemen-elemen komunitas tersebut adalah terbentuknya kebutuhan situasi sampai *interest* dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan bahkan nilai-nilai serta norma-norma.

Apapun definisinya komunitas harus memiliki sifat interaksi serta memiliki orientasi. Keanggotaan sebuah komunitas terbentuk lebih karena adanya struktur yang alamiah. Ciri utama dari suatu komunitas adalah adanya keharmonisan, egalitarian, sikap saling berbagi nilai dan kehidupan. Community begitu penting.

Begitu besar peran komunitas karena dapat menjadi *representative* kebutuhan individu-individu di dalamnya, dapat menciptakan keselarasan dengan alam, dan memungkinkan untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga diluarnya. Suatu komunitas tidak akan menutup dirinya sendiri. (Syahyuti, 2005).

Perkembangan lanjutnya dari *community development* adalah penerapan di negara-negara berkembang melalui bantuan ekonomi serta peranannya yang dimainkan oleh tenaga-tenaga ahli dari negara-negara barat dalam program-program *community development*. Program ini berpangkal pada pengamatan mengenai berbagai masalah ekonomi, politik dan sosial budaya yang dihadapi oleh dunia, terutama negara-negara berkembang setelah perang Dunia II. Sehubungan dengan itu *community development* meningkat menjadi gerakan internasional Dunia Ketiga pada saat perumusan kembali *community development* sebagai hasil dari *Cambridge Summer Conference on African Administration* pada tahun 1984. dalam waktu singkat rumusan konferensi ini tersebar dan mulai diterapkan di banyak negara berkembang. (Kalangie 1994 ; 61).

Dengan rumusan ruang lingkup *community development* menjadi sangat luas, mencakup sektor-sektor : kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, sanitasi lingkungan, kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak, industri rumah tangga, pendidikan anak, dan lain-lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

Ruang lingkup ini merupakan ciri *community development* tahun-tahun limapuluhan dan enampuluhan.

Community development mendapat perhatian khusus oleh praktisi dan akademisi. Baik antara teori, praktek, strategis dan analisis dalam menerapkan atau implementasi suatu program. Menurut Christenson dan Robinson, (1994) bahwa yang terpenting dalam *community development* adalah model pembangunan *self-help*, *technical assistance* dan *conflict*.

Secara umum *community development* yang di gambarkan oleh International Center for Sustainable Development (ICSD) (2006), Syahyuti (2005), dan Kalangie (1994) bahwa dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apa bila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Program *Community development* memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*lokal resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu: sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan

(*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*), kesemuanya berjalan secara simultan.

Selanjutnya menurut Foster dalam Kalangie 1994 ; 65, mengemukakan bahwa hampir semua program *community development* yang besar pernah ada, setidaknya menunjukkan enam ciri pokok, yang akan dikemukakan dibawah ini :

Pertama, Tujuan-tujuan dicapai bermakna serba guna. Program-program *community development* biasanya dirancang dan menangani masalah dari berbagai sektor, terutama pertanian (*Resources management*), kelompok masyarakat lokal (*organizing*) dan pendidikan (*education*). Namun dampaknya akan mempengaruhi semua sector kehidupan komunitas. Dengan sendirinya organisasinya harus mampu mengkoordinasikan tenaga-tenaga ahli selain program-program antara departemen untuk jangka waktu yang panjang.

Menurut Darmawan Salaman, (2005) bahwa, implementasi dari *community development* untuk pengelolaan *sosial forestry* di Indonesia adalah terlepas dari yang dianut, terdapat tiga unsur yang selalu terkait. Ketiga unsur itu adalah pendidikan komunitas (*Community education*), pengorganisasian komunitas (*community organizing*) dan manajemen sumber daya manusia (*community resources management*)

Kedua, Penekanan pada partisipasi komunitas dan prakarsa yang berasal dari komunitas itu sendiri. Untuk dapat menjelaskan gagasan ini komunitas diajak untuk mengidentifikasi sendiri kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan persepsi dan harapan mereka serta menentukan urutan prioritas kebutuhan (*felt needs*). Syahyuti (2005 ; 23) menyebutkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan petani diutamakan berdasarkan kebutuhan. Di mana petani menggunakan prinsip-prinsip komunitas dalam setiap proses, sebab kegagalan selama ini petani selalu menggunakan pendekatan individual dan rumah tangga. Namun apa bila petani menggunakan pendekatan horizontal sesama petani maka inilah modal sosial dalam merancang prioritas kebutuhan petani.

Ketiga, Penggunaan sumber daya dari komunitas sendiri. dengan azas menolong komunitas supaya dapat menolong diri mereka sendiri dengan sumber daya setempat, maka tenaga-tenaga dari luar bertugas memberikan bimbingan individu, bimbingan teknis, menyiapkan bahan-bahan yang tidak terdapat dalam lingkungan setempat, serta mengkoordinasi dengan program-program regional dan nasional yang lebih luas. Ciri yang ini lebih menekankan pada penyadaran kritis komunitas setempat terhadap sumber daya alam setempat. Darmawan Salaman (2005), Crhistenson dan Robinson, (1994), bahwa pengalaman dari berbagai negara menunjukkan tiga model dalam praksis *community development* yakni model bantuan teknis (*technical assistance*) pemandirian (*self-help*), dan konflik (*conflict*).

Keempat, peningkatan dan pemberian tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin setempat. *Community development* menekankan bahwa tanpa tokoh-tokoh formal (dipilih dan memilih) dan informal (tidak resmi sebagai pejabat atau untuk turut merencanakan dan memimpin pelaksanaan program serta merupakan pula contoh bagi penduduk yang lebih konservatif. Sejalan dengan hasil artikel yang ditulis oleh Budiati, (2006) bahwa, banyak kebijakan pengelolaan sumber daya tidak berhasil dilakukan, karena pengelola (pemerintah) tidak dapat mengatsi keadaan. Penyebabnya adalah pertama, biaya transaksi dalam penegakan aturan atau penjagaan sumber daya seperti biaya pengawasan, personil, dsb. Sehingga penumpang bebas dan tidak dapat dikontrol. Kedua, tindak oportunistis (*opportunistic behavior*) perburuan rute oleh aparat pengawas lapangan yang begitu luas. Jadi, betapa penting para *stakeholder* yang ada pada masyarakat setempat untuk dilibatkan (*partisipasion*) dalam perumusan, pelaksanaan, evaluasi suatu kebijakan yang akan diterapkan. Atau aturan lokal, norma dan nilai yang belum dikenal secara meluas, seperti pengaturan akses dan teknologi penangkapan ikan di suatu kawasan terumbu karang. Namun aturan pengelolaan sumber daya laut tidak terlalu asing di Indonesia, karena telah dan atau pernah diterapkan antara lain *Sasi* di Maluku, *Panglima Laut* di Aceh, *A wing-a wing* di Lombok, dan *Panglima Menteng* di Selayar.

Kelima, pembinaan karakter atau mental. Ciri *community development* ini merupakan kesadaran mandiri pribadi dan keyakinan pelaksanaan

projek-projek mereka sebagai satu bentuk tanggung jawab dan kewajiban, serta kemampuan mengorganisasikan dan mengelola tujuan kegiatan-kegiatan yang diperlukan sebaik mungkin supaya hasil atau tujuan yang mereka putuskan bersama dapat terwujud. Para ahli *community development* yang sangat mendukung pentingnya pembinaan karakter ini menyatakan bahwa “bahkan apa yang dikerjakan tetapi bagaimana cara mengerjakannya” (Colonial Office 1958 dalam Kalangie 1994; 62). Ciri ini menekankan pada fungsi institusi lokal dalam melakukan pembinaan dan memberikan contoh kepada komunitas lainnya. Menurut Syahyuti, (2005) bahwa pembinaan karakter dan mental adalah melalui proses interaksi sesama komunitas yang dilandasi oleh tujuan bersama berdasarkan nilai, norma dan aturan bersama. Membantu sesama tanpa harus mengharapkan imbalan. Sedangkan pembinaan khusus tentang motivasi ekonomi dari pelaku dalam berinteraksi.

Keenam, Peranan pemerintah tingkat desa. Semua program *community development* memiliki sejumlah tenaga atau petugas tingkat desa yang dapat bekerja secara serba guna. Biasanya sebelum bertugas mereka dilatih masalah praktis dan keterampilan dalam bidang segala sector, tergantung kebutuhan masyarakat setempat. Peranan mereka bukan hanya menggerakkan penduduk desa untuk datang dengan senang hati melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dan memberi bimbingan praktis, tetapi juga sebagai pembantu tenaga-tenaga teknis berperingkat lebih tinggi. Kalau dilihat bukan saja pemerintah yang harus terlibat disini, tapi pihak swasta

juga amat penting untuk berperan. Seperti pada Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), memiliki salah satu yang bertugas sebagai Fasilitator Desa. Tugas mereka mendampingi komunitas dalam memahami dan menyadarkan mereka akan pentingnya kemandirian untuk keluar dari kemiskinan melalui pengorganisasian/ lembaga.

C. Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Masyarakat (*Community Resource Management*)

Kebanyakan literature membahas peran aktif masyarakat lebih menggunakan istilah *Community Based*. Oleh karena itu, pada thesis ini menggunakan istilah *community based* dalam menjelaskan pembangunan komunitas berbasis masyarakat lokal. Pertanyaan yang paling pertama muncul adalah apakah arti berbasis masyarakat (*community-based*) ?. Beberapa pokok oikiran Brundtland Report 1987 dalam Satria (2004) adalah :

1. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat mencukupi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Pembangunan berkelanjutan memerlukan perubahan kerangka hukum dan kelembagaan.
3. Hukum yang diperlukan adalah hukum yang didukung oleh masyarakat sehingga menimbulkan partisipasi masyarakat yang lebih besar.

4. Cara yang terbaik adalah melalui:
 - a) Desentralisasi pengelolaan sumber daya yang menjadi penopang masyarakat setempat; dan,
 - b) Pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumber daya.
5. Selain itu perlu juga didorong:
 - a) Sumber daya tersebut.
 - b) Inisiatif-inisiatif masyarakat;
 - c) Pemberian wewenang pada organisasi-organisasi masyarakat, dan
 - d) Memperkokoh demokrasi setempat.

Inti pengertian berbasis masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bahwa pengelolaan sumber alam itu dilakukan melalui cara desentralisasi pengelolaan sumber daya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan adanya pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumber daya tersebut

Community Based Management (CBM) mengandalkan kepada “komunitas”, merupakan sebagai pelaku utama pembangunan. Semua yang datang dari luar hanya pendukung untuk membantu komunitas. Komunitas didukung melalui berbagai hal mulai penelitian, pengembangan kebijakan, pendidikan dan penguatan kapasitas, serta penguatan jaringan. *Community Based Management* (CBM) dapat dilakukan pada berbagai komunitas

manapun, baik pertanian, perikanan, kehutanan, maupun industri pedesaan. (Syahyuti 2005 : 102-115). Satu konsep yang dekat dengan *Community Based Management* (CBM) adalah *Community Resource Management* yang merupakan suatu pendekatan pembangunan yang menekankan kepada kesaling hubungan manusia dengan lingkungannya. Kerusakan sumber daya alam akan berdampak pada kehidupan manusia. Karena itu manusia harus mengontrol aktifitasnya, misalnya dengan selalu menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan.

Community Based Management (CBM) dimulai dengan pengembangan komunitas yang terdiri atas individu-individu yang paham tentang ekosistem dan ingin bekerja dengan orang lain secara inklusif dan hormat untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan lingkungannya, mencoba untuk menyediakan kehidupan yang *sustain* untuk generasi sekarang dan mendatang, serta memiliki komitmen dengan keadilan sosial. (Syahyuti 2005 : 102-115).

Konsep yang dekat dengan *Community Based Management* adalah *Community Resource Management* yang merupakan pendekatan dalam pembangunan yang menekankan pada kesaling hubungan antara manusia dengan segala hal di lingkungannya.

Dari konsep *Community Based Management* (CBM) lahir pendekatan pengelolaan sumber daya alam oleh, untuk dan dengan komunitas lokal. (Gibbs dan Bromley, 1989 dalam Syahyuti 2005 : 102-115). Keberlanjutan

pengelolaan sumber daya tergantung kepada partisipasi komunitas lokal. Mereka akan aktif apabila mereka mampu melihat keuntungan dengan keterlibatan dan memiliki akses terhadap sumber daya.

Tingkat efektifitas jika mengandalkan pengelolaan masyarakat lokal adalah masih berjalannya mekanisme tekanan dan sanksi, dapat menggambarkan secara detail pengetahuan lokal dan dinamika ekologisnya, serta komunitas lokal akan lebih mendorong konservasi sumber daya alam.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam begitu pula pada pengelolaan sumber daya laut. Pengelolaan sumber daya laut merupakan pendekatan yang melihat dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan guna mencapai pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam usaha manusia dalam merubah ekosistem sumber daya alam, agar manusia memperoleh manfaat yang maksimal dengan mempertahankan kontinuitas produksinya. Pengelolaan sumber daya laut merupakan salah satu penghususan dari pengelolaan sumber daya alam.

Nessa (1981 : 7) dan Kusumastanto (1984 : 9) dalam Baso (2004 : 27), pengelolaan sumber daya alam merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya laut serta dengan mempertahankan kelestarian. Kegiatan tersebut meliputi pengaturan penangkapan, menjaga kawasan produksi dan produktivitas alam, dan mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk

menjaga kelestarian yang sebelumnya bersifat statis menjadi bermanfaat secara ekonomi.

Pengelolaan sumber daya laut merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan eksploitasi dengan tetap menjaga kelestarian. Pada umumnya tidak langsung ditunjukkan pada lautnya akan tetapi lebih cenderung pada usaha pengaturan aktivitas pemanfaatnya dan usaha perbaikan lingkungan. (Anderson 1996 dan Rounselfel, 1975).

Clark dan Munro (1975 : 92-106) dalam Baso 2004 : 27-31), merumuskan pendekatan sumber daya laut berkelanjutan dilakukan sebagai berikut :

- a) Sustainable secara ekologi,
- b) Sustainable secara Sosial Ekonomi. Misalkan dalam mempertahankan atau memacu kesejahteraan sosial ekonomi jangka panjang kesejahteraan sosial ekonomi berdasarkan pada perpaduan antara indicator ekonomi dan sosial yang relevan, fokus utama adalah keuntungan bersih yang senantiasa meningkatkan baik dalam jumlah maupun pemerataan.
- c) Sustainable masyarakat menekankan pada tingkat mikro. Misalnya menekankan pada keinginan akan memepertahankan sistem manusia yang sangat berharga pada kebenaran mereka sendiri.

- d) Sustainable institusi melibatkan penjagaan kecocokan finansial, admisnistarasi, dan kapasitas organisasi jangka panjang sebagai persaratan ketiga komponen sustainable di atas.

Jadi, pengelolaan sumber daya laut harus berlanjut secara terus menerus yang dilandasi dengan kelestarian alam. Pengelolaan berkelanjutan adalah suatu strategi perencanaan pembangunan yang membatasi pemanfaatan ekosistem. Pembatasan yang luwes yang tergantung pada kondisi sosial ekonomi, lingkungan serta kemampuan manusia menerima dampak kegiatannya.

Strategi perencanaan pengelolaan sumber daya laut yang mengintegrasikan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Perencanaan horisontal dan vertikal ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen sehingga pengelolaan sumber daya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pengelolaan sumber daya laut harus memiliki hasil yang nyata. Sebab, masyarakat terlibat hanya bila mereka melihat keuntungan secara kasat mata baik dari hasil yang diproduksi. Selain itu, mereka mau terlibat bila memiliki kemampuan yang sesuai dari sisi pengetahuan dan teknologi. Karena itu, pengetahuan lokal (*lokal indegenous knowledge*) perlu dipertimbangkan.

Kerusakan sumber daya alam, akan berdampak kepada kehidupan manusia. Karena itu, manusia harus mengontrol aktifitasnya, misalnya

dengan selalu menggunakan sumber daya dengan yang dapat diperbaharui (*renewal*) dan berkelanjutan. *Community Resource Management* dimulai dengan pengembangan komunitas (*building communitites*), yang terdiri atas individu-individu yang paham akan ekosistem, sumber daya alam, dan lingkungannya, serta ingin bekerja sama dengan orang lain secara inklusif dan ramah lingkungan, mampu memberikan dan menyediakan sumber kehidupan yang *sustainabel* untuk generasi sekarang dan yang akan datang serta mempunyai komitmen terhadap kehidupan sosial ekonomi.

Pada prinsipnya *Community Natural Resource Management* menekankan pada suatu aktifitas manajemen sumber daya alam oleh dan untuk, dengan komunitas lokal. Keberlangsungan *Community Natural Resource Management* tergantung dari partisipasi dan peran aktif masyarakat lokal. Masyarakat aktif jika melihat keuntungan dengan keterlibatannya dan memiliki akses terhadap sumber daya alam tersebut. Penting untuk memahami bagaimana organisasi yang kuat milik masyarakat yang ada dalam masyarakat lokal tersebut.

Ada beberapa tujuan *Community Natural Resource Management* menurut Syahyuti, 2005 antara lain yakni :

1. Peningkatan kesejahteraan dan keterjaminan hidup masyarakat.
2. Peningkatan konservasi sumber daya alam dan
3. Pemberdayaan masyarakat lokal.

Asumsi pentingnya peranan masyarakat lokal adalah efisiensi dan efektifnya yang lebih besar dalam mengatur sendiri sumber daya alam sesuai dengan pengetahuan masyarakat lokal, yang lebih menghemat biaya, dan keputusan lebih baik akan mencapai melalui internalisasi biaya sosial dan lingkungan. Tingginya efektifitas jika mengandalkan pengaturan masyarakat lokal adalah karena masih berjalannya mekanisme tekanan dan sanksi, norma, nilai dan aturan yang telah disepakati bersama, hasil dari pengetahuan masyarakat lokal mengenai lingkungan sosial yang khas.

Pengaturan sumber daya tidak terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Sebagian besar pengguna sumber daya berinteraksi dengan pihak lain dalam suatu lingkungan kelembagaan di luar pengaturan kepemilikan kolektif. Lingkungan kelembagaan eksternal ini bisa saja secara langsung atau tidak langsung mendukung atau menghambat organisasi atau pelaksanaan rezim kepemilikan kolektif atau komunal. Komunitas nelayan Dusun Lemba memiliki kapasitas untuk mengatur pengelolaan sumber daya terumbu karang yang berada di sekitar pulaunya. Pengelolaan ini dapat dikatakan sebagai pengelolaan berbasis masyarakat atau dikenal sebagai CBM (*“community-based management”*) yang terbentuk dan dilaksanakan oleh komunitas ini, meskipun tanpa adanya penyuluhan atau pendampingan dari pihak luar. Pengelolaan sumber daya komunal semacam ini hanya dapat berkesinambungan jika memenuhi beberapa syarat atau prinsip tertentu. Salah satunya adalah pengakuan dari lingkungan kelembagaan eksternal,

dalam hal ini adalah pemerintah tingkat nasional, regional dan lokal, terhadap hak atau otonomi komunitas untuk mengorganisasi suatu pengaturan kelembagaan komunal. Diakui bahwa aksi bersama atau pengaturan kelembagaan oleh komunitas lokal dalam pembangunan desa, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dipengaruhi oleh antara lain :

1. Struktur institusi makro antara lain hukum, kebijakan, program, dan
2. Modal sosial yang mencakup jaringan, peran, norma timbal-balik, nilai, keyakinan.

Dengan demikian, baik struktur makro, maupun kondisi mikro di suatu komunitas penting dalam membentuk insentif atau disinsentif terhadap aksi bersama. Masyarakat akan antusias jika melihat keuntungan (*tangible benefit*) secara kasat mata baik dari sisi produk yang akan dihasilkan, jasa yang diberikan, ataupun pendapatan. Selain itu, mereka mau terlibat jika mempunyai kemampuan lebih melalui teknologi dan pengetahuan. Karena itu, *loval indigenous knowl edge* perlu dipertimbangkan.

Dalam menyusun instrument kebijakan dan pendekatan, berbeda antar level. Pada level lokal dan lapang harus fokus pada pengembangan sistem manajemen yang bertolak dari kondisi nyata yang ada di masyarakat, pada level menengah baik pemerintah maupun non-pemerintah harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pendekatan pembangunan dalam aktivitas yang konkrit, pada level nasional, harus mampu merincih dan

mengimplementasikan kebijakan yang diterapkan lebih tepat terhadap sasaran.

Uarian di atas bahwa mengungkapkan rencana menggunakan prinsip pembangunan berbasis komunitas dari setiap proses. Pilihan terhadap paradigma ini dirasa tepat, karena konsep pembangunan kelautan selama ini yang berlandaskan pada pendekatan individual dan rumah tangga kurang berhasil. Dengan menerapkan pembangunan berbasis komunitas lebih menghargai dan menekankan pada ikatan institusi-institusi dan pranata-pranata sosial horizontal, yang berkembang di masyarakat. Pranata dan institusi sosial ini merupakan modal *sosial capital* yang sangat besar yang selama ini kurang diperhatikan.

Bukti diterapkannya konsep pembangunan berbasis komunitas, setidaknya terlihat dari empat bentuk antara lain :

1. Penetapan lokasi program pada desa sebagai unit terkecil,
2. Penempatan *participatory rural appraisal* dalam penyusunan rencana aksi yang dilakukan secara partisipasi,
3. Upaya meningkatkan kemandirian,
4. Serta menggunakan institusi dan pranata lokal.

Upaya untuk mendongkrak kemandirian lokal dapat dipandang sebagai bentuk penguatan kesatuan masyarakat sebagai komunitas adalah ketonomiannya yang tinggi. Dengan kemandirian yang tinggi, maka keotonomian masyarakat terbangun dengan sendirinya.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan yang menggunakan prinsip basis komunitas adalah kebutuhan waktu yang lebih lama, karena setiap tahapan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat secara partisipasi. Proses tersebut dapat menjadi lebih cepat apabila dapat didorong melalui interaksi yang lebih intensif di antara sesama warga, karena kegagalan maupun keberhasilan akan tergantung pada kesadaran, terbangunnya pembelajaran, dan menjamin kerjasama antar (*co-management*) warga. Sehingga para pelaksana harus membuat kebijakan sesuai dengan pola dan bentuk komunitas, dan mengembangkan program yang khas berdasarkan kondisi masyarakat lokal.

Pada tahap implementasi program pembangunan masyarakat perlu dibangun *capacity building*, serta partisipasi dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman. Kata kunci pokoknya adalah bekerja penuh dengan komunitas sejak awal. Secara bertahap komunitas akan mengambil alih tanggung jawab ketika kapasitasnya juga meningkat. Karena itu, partisipasi dan dukungan komunitas harus memadai. Untuk perlu dilakukan peningkatan *capacity building* untuk komunitas. Peningkatan *capacity building* menganut pendekatan *co-management* dimana masyarakat dan pemerintah bekerja sama, dan adanya pemimpin masyarakat lokal yang kuat.

Banyak proyek yang gagal karena target *audience proyek* hanya pada para nelayan tidak atau menyepelekan para *stakeholder* penggunaan sumber daya yang lainnya. Seperti yang digambarkan oleh Carlos dan Pomeroy,

1996 dalam Lampe dan Ansar, 2004), bahwa di Philipina misalnya, proyek awal *community based management* berfokus pada kegiatan-kegiatan nelayan belaka. Sementara itu ada manfaat bagi nelayan, sering memencilkan *stakeholder* lain, seperti pedagang ikan terhadap nelayan yang mempunyai hubungan sangkut paut. Melalui hubungan ini pedagang ikan dapat sering mengontrol aksi-aksi nelayan. Aliansi pedagang ikan menjuruskan mereka memaksa nelayan terhadap rencana-rencana yang terorganisir dan institusional yang dibuat di bawah proyek *community based management*.

Lanjut yang disampaikan dalam hasil penelitian Munsir dan Ansar, 2005 bahwa untuk pekerjaan *co-management* adalah esensi bagi partner memiliki pemahaman yang baik tentang posisi mereka masing-masing. Melakukan konsultasi informal pada bantuan permulaan penciptaan kepentingan dalam isu dan memungkinkan *stakeholders* mengespresikan pandangan-pandangannya pada opsi pengelolaan alternative (*rapport*).

Sebagai konsep pembangunan juga fokus kepada permasalahan hubungan-hubungan sosial dan politik. Karena itu, tidak dapat dipandang sebagai terisolasi dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dalam konteks *capacity building* sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan, maka akan melibatkan indentifikasi berbagai kendala dalam pembangunan. Pembangunan pada pokoknya adalah bagaimana agar dicapai perubahan

positif dalam hidup, kemajuan personal bersama-sama dengan kemajuan masyarakat secara umum, dan bagaimana proses serta hasilnya terhadap upaya pengurangan kemiskinan, ketidakadilan, Diskriminasi, dan merealisasikan potensi manusia melalui keadilan sosial dan ekonomi.

E. Kerangka Pikir.

Pengelolaan sumber daya laut yang berbasis masyarakat dipandang sebagai paradigma baru. Paradigma ini muncul karena kekuarang puasan terhadap pendekatan sebelumnya, yang cenderung undividualistik dan bias ekonomi pasar. Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat menggunakan ikatan-ikatan horizontal sebagai pilar utama dan menggunakan kaca mata yang lebih luas (dari sekedar pembangunan ekonomi) dapat dipandang sebagai inovatif dalam pembangunan. Ikatan horizontal dan suau komunitas merupakan bagian bagian kekuatan modal sosial yang sangat penting untuk mengembangkan berbagai tindakan kolektif. Salah satu syarat tumbuhnya perilaku kolektif adalah dengan terbangunnya suasana yang partisipasi, mulai perencanaan sampai pelaksanaan.

Sumber daya laut yang ada di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate perlu sebuah perencanaan pengelolaan yang tepat. Pemanfatan dan eksploitasi yang berlebihan perlu ditata secara berkelanjutan. Potensi yang besar baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan sudah semakin menurun akibat pengelolaan yang kurang tepat tanpa ada perencanaan sustainable.

Pengelolaan sumber daya yang ada dilakukan masyarakat lokal dan masyarakat pendatang yang berlebihan tanpa memperhatikan ekosistem. Masyarakat lokal mempunyai sistem pengelolaan yang ramah lingkungan namun dengan perubahan dan tuntutan ekonomi merubah pola pikir masyarakat. Ekosistem dan lingkungan tidak lagi sebagai sesuatu yang dipertahankan. Begitu pula pengaruh dari masyarakat pendatang yang menimbulkan berbagai kecemburuan masyarakat lokal.

Kondisi masyarakat lokal perlu ada intervensi dari sebuah program pemberdayaan. Program dengan menari pencaharian alternatif selain sebagai nelayan. Hal yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak NGO dalam sebuah program bagi masyarakat lokal. Proses penyadaran dan pemberian pendidikan pengetahuan terhadap teknologi baru untuk mengelolah sumber daya yang ada dengan memperhatikan dampak lingkungannya.

Karangka Pikir yang dibangun sebagai berikut :

